

ABSTRAK

Suyatno, NIM. 20301800164. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)*. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA. 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019, dampak dan hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 serta solusinya. Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terkait dengan proses demokrasi bagi penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi: Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati, Komisioner KPUD Kabupaten Pati dan Pihak penggugat dan tergugat dengan teknik wawancara dan observasi. Sumber data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik studi kepustakaan/dokumen. Metode analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 2) Dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: keadilan pemilu dapat ditegakkan, mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil serta terjaminnya hak dari peserta Pemilu; 3) Hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon dan belum adanya penjelasan proses penyelesaian sengketa Pemilu secara detail oleh UU Pemilu. Adapun solusinya adalah perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, diperlukan adanya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten

ABSTRACT

Suyatno, NIM. 20301800164. *Election Process Dispute Resolution Procedures by the Pati Regency Election Supervisory Body (Study of Simultaneous General Elections in 2019)*. Masters Program in Law, Faculty of Law UNISSULA. 2021.

The purpose of this study was to find out and analyze the procedures and technicalities for resolving electoral process disputes by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections, the impact and obstacles to the Pati Regency Election Process dispute resolution by the Pati Regency Elections Supervisory Agency in the 2019 simultaneous elections and their solutions. The theoretical benefit is to contribute ideas in the field of legal science, especially Constitutional Law/State Administration Law related to the democratic process for the implementation of elections.

This research is a type of normative juridical research (legal research) and a qualitative descriptive approach. Primary data sources include: Pati Regency Bawaslu Commissioner, Pati Regency KPUD Commissioner and Plaintiffs and Defendants using interview and observation techniques. Secondary data sources include: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with library/document study techniques. Data analysis methods include: data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

The results showed that: 1) The procedures and technicalities for resolving electoral process disputes by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections were carried out in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Perbawaslu Number 18 of 2017 concerning Procedures for Dispute Resolution of the Election Process. 2) The impact of the dispute resolution of the election process by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections includes: electoral justice can be enforced, realizing the implementation of honest and fair election stages and ensuring the rights of election participants; 3) Barriers to the dispute resolution of the election process by the Pati Regency Bawaslu in the 2019 simultaneous elections include: the difference in interpretation of the prevailing laws and regulations between the Adjudication Session Council and the Respondent and the absence of an explanation of the election dispute resolution process in detail by the Election Law. The solution is the need for a Standard Operating Procedure (SOP) in handling dispute resolution so that there is uniformity in the process to output in the form of decisions between the RI Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu throughout Indonesia, it is necessary to strengthen the capacity of Supervisory Human Resources (HR). Elections, especially the human resources of Regency/Municipal Bawaslu Members in carrying out dispute resolution authority as attributable to Law Number 7 of 2017 concerning Elections.

Keywords: *Election Process Dispute, Pati Regency Bawaslu*